

ABSTRAK

JUNAI DI SANJAYA

Pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya.

Permasalahannya adalah untuk mengetahui aturan mengenai ijin pengangkutan kayu hasil hutan yang dibenarkan dalam undang-undang, pertanggungjawaban pidana atas tindakan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi surat yang sah, pertimbangan hakim atas tindakan pengangkutan kayu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 K/Pid.Sus-LH/2022

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder.

Disimpulkan bahwa aturan mengenai ijin pengangkutan kayu hasil hutan yang dibenarkan dalam undang-undang, agribisnis merupakan suatu cara untuk melihat pertanian sebagai suatu sistem bisnis yang terdiri dari subsistem agribisnis hulu; Pertanggungjawaban pidana atas tindakan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi surat yang mana tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Pertimbangan hakim atas tindakan pengangkutan kayu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 K/Pid.Sus-LH/2022 Berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa dan Penuntut umum tersebut harus ditolak. Penulis sangat setuju jika pelaku penebangan pohon di hutan tanpa ijin dihukum dengan menyita aset perusahaan dan denda agar tercipta kepastian hukum dan melindungi hutan di Indonesia.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Perseroan Terbatas, Illegal logging

ABSTRACT

JUNAI DI SANJAYA

The definition of forest is an ecosystem unit in the form of an expanse of land containing biological natural resources dominated by trees in a natural environment.

The problem is to know the rules regarding permits for transporting forest product wood which are justified by law, criminal liability for the act of transporting wood without a valid document, the judge's consideration of the act of transporting wood in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 37 K/Pid.Sus- LH/2022

This research is descriptive in nature with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is to emphasize legal science with an emphasis on secondary data.

It is concluded that the regulations regarding permits for transporting forest wood products are justified in law, agribusiness is a way to see agriculture as a business system consisting of upstream agribusiness subsystems; Criminal liability for the act of dumping wood without a document is an unlawful act and there is no justification or elimination of the unlawful nature of the crime committed. The judge's consideration of the act of transporting wood in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 37 K/Pid.Sus-LH/2022 Based on the considerations above, it also turns out that the Judex Facti decision in this case does not conflict with the law and/or statute, so The defendant's and public prosecutor's appeals must be rejected. The author strongly agrees that perpetrators of felling trees in forests without permission are punished by confiscating company assets and fines in order to create legal certainty and protect forests in Indonesia.

Keywords: Liability, Limited Liability Company, Illegal logging